



SURVEI TII, POLRI PALING RAWAN SUAP Yogya Terbersih dari Korupsi

JAKARTA (KR) - Yogyakarta merupakan kota paling bersih dari tindak pidana korupsi. Inilah hasil survei Transparency International Indonesia (TII) mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Tahun 2008 yang diumumkan di Balai Kartini Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (21/1). Menurut Manajer Riset dan Kebijakan TII Frenky Simanjuntak, survei kuantitatif ini dilakukan mulai September-Desember 2008. Sur-

vei dilakukan di 50 kota yang terdiri dari 33 ibu kota provinsi ditambah 17 kota besar. Metode yang digunakan adalah wawancara tatap muka. Responden yang diambil berasal dari pelaku bisnis 60 persen, pejabat publik 30 persen dan tokoh masyarakat 10 persen. Frenky memaparkan, dari 1.218 pelaku bisnis yang diwawancarai, sebanyak 48 persen mengaku terjadi dan mengalami interaksi suap. "Hampir setengahnya melibatkan interaksi suap," kata

Frenky.

Berdasar analisis TII, Yogyakarta mendapat nilai 6,43, disusul ranking di bawahnya Palangkaraya dengan nilai 6,1. Kota lainnya, Banda Aceh (5,87), Jambi (5,57) dan Mataram (5,1). Sedang Jakarta menempati urutan 20 besar dengan nilai 4,06 dan paling buncit sekaligus kota terkorup adalah Kota Kupang.

Dijelaskan Frenky, Yogyakarta terpilih sebagai kota
***Bersambung hal 27 kol 4**

Yogya

paling bersih karena sejak tahun 2006 daerah tersebut secara terencana menerapkan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap. Sedang Kota Kupang menjadi kota terkorup karena banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan anggota DPRD setempat.

Sedang Polri menempati urutan teratas untuk kategori rawan terjadinya praktik suap. TII menyebutkan polisi mendapatkan indeks 48 persen, disusul di bawahnya, Bea Cukai 41 persen, Kantor Imigrasi 34 persen, DLLAJR 33 persen, Pemda Kota/-

Kabupaten 33 persen, Badan Pertanahan Nasional 32 persen, Pelindo 30 persen, Pengadilan 30 persen, DepkumHAM 21 persen, Angkasa Pura 21 persen, Pajak Daerah 17 persen dan MUI 10 persen. "Penghitungan dilakukan dengan cara mengukur rasio kontak antara pelaku bisnis dan pejabat institusi publik yang terjadi suap dibanding total tempat yang terjadi," terangnya.

Ia menjelaskan, praktik suap di MUI terjadi dalam proses pengurusan sertifikasi halal produk makanan, minuman dan kosmetik.

"Karena itu, respondennya mayoritas pengusaha makanan dan kosmetik," terangnya.

Terkait hasil tersebut, Mabas Polri mempertanyakan metode survei yang digunakan TII. "Sekarang ini yang perlu dipertanyakan adalah metode penelitian apa yang digunakan. Kalau punyanya data, di bidang apa saja yang diduga punya suap agar disampaikan kepada Polri dan nanti akan ditindaklanjuti," kata Kadiv Humas Mabas Polri Irjen Pol Abu Bakar Nataprawira.

(Edi/Ful/Sim/Ati/Don)-z

Dihaturkan Kepada Yth. :

ikota Yogyakarta

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Dharma Wanita Persatuan | Positif | Segera | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 16 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005